



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 22 Juni 2021

Halaman: 1

'LOCKDOWN' JADI PILIHAN TERAKHIR
Sultan: Batasi Diri, Bersikap Bijak

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, Pemda DIY tidak akan melakukan kebijakan *lockdown*, karena ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya terkait pembiayaan jika kebijakan itu dilakukan. Karena, *lockdown* akan menjadi pilihan terakhir.

Adapun untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19, Pemda DIY bersama

Pemkab/Pemkot telah memutuskan untuk terus melakukan pengetatan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

"Saya berharap semua pihak mampu membatasi diri dan bersikap bijak. Adapun untuk Satgas Covid-19 di setiap kalurahan yang belum terbentuk, diimbau untuk segera diselesaikan. Karena keberadaan Satgas Covid-19 Kalurahan menjadi sesuatu yang penting. Keputusan kita pada rapat pertama dengan rumah sakit dan akademisi tadi juga intinya kita akan berupaya membatasi mobilitas masyarakat supaya tidak terjadi kerumunan," papar Sultan HB X usai Rapat Koordinasi Gubernur DIY dengan Bupati dan Walikota terkait Penanganan Covid-19 di DIY di Gedhong Pracimosono, Kepatihan, Yogyakarta, Senin (21/6) petang.

Sultan mengungkapkan, pengetatan PPKM Mikro telah menjadi kesepakatan bersama kabupaten/kota. Selain pengetatan PPKM Mikro, kesepakatan bersama kabupaten/kota lainnya penambahan kamar bagi pasien positif Covid-19 yang harus dirawat, maupun bagi yang menjalani karantina.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Sultan: "Saya kira masih akan sama, yakni yang sudah menjadi keputusan Gubernur DIY, yang ditindaklanjuti bupati/walikota, masih sama membatasi pergerakan masyarakat atau mobilitas masyarakat," imbu Sultan.

Pakar epidemiologi dari UGM Dr Riris Andono Ahmad menyatakan, salah satu cara untuk menurunkan atau mengendalikan penularan ketika kasus sudah meningkat tinggi yakni dengan menghentikan mobilitas. Karena cara seperti itu terbukti cukup ampuh diterapkan di sejumlah negara seperti Vietnam dan New Zealand.

"Setidaknya 70 persen populasi di DIY harus tinggal di rumah selama dua kali masa infeksius atau 20 hari. Ketika 70 persen populasi warga DIY di rumah saja maka virus itu akan kesulitan menyebar. Periode infeksius pertama akan terjadi perubahan pola penularan kemungkinan akan berpindah ke rumah. Periode (infeksius) kedua menghentikan menghabiskan penularan di rumah," jelas Riris Andono.

Menurut Riris, dalam kondisi seperti sekarang penanganan Covid-19 tidak bisa dibebankan ke pihak tertentu saja, namun butuh sinergi semua pihak. Salah satu caranya penegakan proses harus selalu dikedepankan dalam semua kegiatan dan membatasi mobilitas. Selama mobilitas dan kerumunan sosial bisa dihindari, diharapkan kenaikan kasus lebih mudah dikendalikan.

Angka kasus Covid-19 harian di DIY masih terus tinggi, mencapai 662 kasus pada Senin (21/6), sehingga total menjadi 53.303 kasus. Kabag Humas Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Ditya Nanaryo Aji mengatakan, untuk pasien sembuh bertambah 218 menjadi 45.853. Sedangkan kasus meninggal bertambah 12 menjadi 1.367 kasus, berdasarkan hasil verifikasi data Dinkes Kabupaten/Kota.

Sementara kasus positif Covid-19 di Kabupaten Kulonprogo mencapai 106 kasus pada Senin (21/6). Kapanewon Sentolo merupakan wilayah terbanyak ditemukan kasus positif Covid-19 yakni 20 kasus. Total kasus positif Covid-19 di Kulonprogo sampai Senin sebanyak 7.148 kasus.

"Angka kesembuhan 534 dan angka kematian 138. Warga yang selesai melakukan isolasi mandiri 5.411 orang dan yang melakukan isolasi mandiri 974 orang," ujar drg Bani Rahayujati Mkes, Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kulonprogo.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kulonprogo Fajar Gegana menyampaikan, kemunculan kluster penularan Covid-19 yang masih terus terjadi adalah imbas dari kelalaian warga. "Masyarakat lalai. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 perlu pula bekerja lebih keras lagi agar kluster penularan Covid-19 (seperti Sangon) tidak terjadi di wilayah lain di Kulonprogo," ujarnya.

(Ria/Ira/Wid-d)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005